



Pembangunan Kultur Good Governance Melalui Pendidikan Islam

Rahmat Hidayat , Kasful Anwar US , Sya'roni

Pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Email: pajakrahmat76@gmail.com

kasfulanwarus@uinjambi.ac.id, syaroni@uinjambi.ac.id

Alamat: Jln. Arif Rahman Hakim No. 111, Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi,
Jambi 36361

Korespondensi penulis: pajakrahmat76@gmail.com

Abstract : *This research discusses the Development of Good Governance Culture Through Islamic Education. The implementation of government in good governance is related to the issue of transparency, public accountability, and so on. Conceptually, it can be understood that good governance reflects a process that gives control to the community over its economy. Its institutions and social and political resources are used not only for development, but also to create integration for the welfare of the people. Good governance is also understood as the implementation of solid and responsible government that is in line with the principles of democracy and the market, efficient government, and government that is free and clean from corruption, collusion, and nepotism (KKN) activities. Democracy, morality, and creative-critical thinking are values that need to be developed and instilled in creating a culture of good governance. Through education, these values are instilled and transformed into the culture of the community. The education of these values is not just cognitive knowledge, but becomes integral in the personality of the younger generation, the future leader of the nation.*

Keywords : *Islamic Education, Good Governance.*

Abstrak : Penelitian ini membahas tentang Pembangunan Kultur Good Governance Melalui Pendidikan Islam. Penyelenggaraan pemerintahan dalam good governance berkaitan dengan isu transparansi, akuntabilitas publik, dan sebagainya. Secara konseptual dapat dipahami bahwa good governance mencerminkan proses yang memberikan kontrol kepada masyarakat atas perekonomiannya. Institusi serta sumber daya sosial dan politiknya digunakan tidak hanya untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan integrasi bagi kesejahteraan rakyat. Good governance juga dipahami sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar, pemerintahan yang efisien, serta pemerintahan yang bebas dan bersih dari kegiatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Demokrasi, moralitas, dan berpikir kreatif-kritis merupakan nilai-nilai yang perlu dikembangkan dan ditanamkan dalam menciptakan kultur good governance. Melalui pendidikan, nilai-nilai tersebut ditanamkan dan ditransformasikan ke dalam budaya masyarakat. Pendidikan nilai-nilai tersebut tidak sekedar pengetahuan kognitif saja, melainkan menjadi integral dalam pribadi generasi muda, calon pemimpin bangsa masa depan.

Kata kunci : Pendidikan Islam, Good Governance

1. LATAR BELAKANG

Secara umum usul fiqih merupakan metode pengkajian Islam pada umumnya dan dalam sejarah kebudayaan Islam inilah satu-satunya metode khas Islam yang berkembang, namun dalam pengertian khusus, usul fiqih adalah suatu metode penemuan hukum syari'ah Sebagai metode penemuan hukum, usul fiqih merupakan bagian dari metode penelitian hukum Islam secara umum. Penelitian hukum Islam secara keseluruhan dibedakan kedalam dua bidang besar, yaitu penelitian hukum Islam deskriptif dan penelitian hukum Islam preskriptif. Penelitian hukum Islam deskriptif menepohong hukum Islam sebagai suatu fenomena sosial yang berinteraksi dengan gejala-gejala sosial lainnya.

Penyelenggaraan pemerintahan dalam good governance berkaitan dengan isu transparansi, akuntabilitas publik, dan sebagainya. Secara konseptual dapat dipahami bahwa

good governance mencerminkan proses yang memberikan kontrol kepada masyarakat atas perekonomiannya. Institusi serta sumber daya sosial dan politiknya digunakan tidak hanya untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan integrasi bagi kesejahteraan rakyat. Good governance juga dipahami sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar, pemerintahan yang efisien, serta pemerintahan yang bebas dan bersih dari kegiatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Good governance sebagai konsep tentang tatanan pemerintahan yang baik tidak terlepas dari pendidikan. Terwujudnya good governance dalam Kehidupan bernegara merupakan refleksi kondisi masyarakat yang mendukung terlaksananya good governance. Kondisi masyarakat yang siap dan mendukung, tidak terlepas pula dari budaya yang ada dalam masyarakat. Budaya masyarakat berkembang karena adanya pendidikan. Tulisan ini berupaya menganalisis tentang membangun budaya good governance melalui pendidikan. Masalah pokok ini diuraikan ke dalam dua pertanyaan berikut: Pertama, bagaimana hakekat kultur good governance. Kedua, bagaimana prospektif pendidikan dalam menciptakan kultur good governance.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Good Governance

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep governance, pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. Governance menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.

Dapat dikatakan bahwa good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frame work bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Padahal, selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten. Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi. Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan.

2.2 Kultur Good Governance

Wacana good governance mendapatkan relevansinya di Indonesia karena tiga alasan. Pertama, krisis ekonomi dan politik yang masih terus-menerus dan belum ada tanda-tanda akan berakhir. Kedua, masih banyaknya korupsi dan berbagai penyimpangan dalam penyelenggaraan negara. Ketiga, kebijakan harapan otonomi daerah yang merupakan harapan besar bagi proses demokratisasi dan sekaligus kekhawatiran akan kegagalan program tersebut. Alasan lain adalah masih belum optimalnya pelayanan birokrasi pemerintahan dan juga sektor swasta dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik.

Pengertian umum tentang good governance adalah suatu pemerintahan yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut: setiap kebijakan diputuskan dengan melibatkan atau mengikutsertakan masyarakat (participation), tanggap terhadap parus bawah (responsiveness), bertumpu pada ajaran supremasi hukum (rule of law), bertanggung jawab (accountability), efektif, efisien, bersih, dan transparan. dapat disebut baik apabila proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan didasarkan atas partisipasi masyarakat, tanggap terhadap aspirasi masyarakat, mencerminkan keragaman yang tumbuh dalam masyarakat, bertanggung jawab pada sebagai sumber dan sasaran serta kebijakan yang dibuat, dapat dilaksanakan dengan ongkos yang rendah dan dalam waktu cepat, dapat dijalankan sesuai dengan tujuan, pelaksanaan dikontrol, dapat diketahui oleh anggota masyarakat seluas-luasnya, dan didasarkan atas aturan-aturan yang jelas, Menurut MM Billah, istilah ini merujuk pada arti asli kata governing yang berarti mengarahkan atau mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik dalam satu negeri. Karena itu good governance dapat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam tindakan dan kehidupan keseharian.

Dengan demikian ranah good governance tidak terbatas pada negara atau birokrasi pemerintahan, tetapi juga pada ranah masyarakat sipil yang direpresentasikan oleh organisasi non-pemerintah (ornop) seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan juga sektor swasta. Singkatnya, tuntutan terhadap good governance tidak selayaknya ditujukan hanya kepada atau pemerintahan, melainkan juga pada masyarakat di luar struktur pemerintahan yang secara getol dan bersemangat menuntut penyelenggaraan good governance pada negara (Billah, 2001:41)

Pada dasarnya, konsep good governance bertumpu pada konsep "sistem pemerintahan yang demokratis". Tegasnya, good governance adalah pemerintahan yang demokratis seperti yang dipraktekkan dalam negara-negara demokrasi maju seperti Amerika dan negara-negara

Eropa Barat. Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dianggap sebagai sistem pemerintahan yang baik karena paling merefleksikan sifat-sifat good governance yang secara normatif dituntut kehadirannya bagi suksesnya suatu bantuan badan-badan dunia di negara-negara sasaran. Ia merupakan alternatif terhadap sistem pemerintahan yang lain, misalnya totalitarianisme Komunis, otoritarianisme militer, Demokrasi Terpimpin, dan lain-lain, yang sempat populer di negara-negara Dunia Ketiga di masa Perang Dingin. (Mujani, 2002:1)

2.3 Peran Pendidikan

Implementasi good governance seperti dikemukakan di atas, harus didukung oleh kultur masyarakat yang mendukung konsep dan ide itu. Pendidikan merupakan salah satu wujud kultur yang berkembang dalam masyarakat, dan dari pendidikan pula akan melahirkan kultur yang terjadi di masyarakat sehingga ada hubungan dialektika antara pendidikan dan kultur. Disinilah letak penting pendidikan dalam menciptakan kultur yang mendukung ide good governance tersebut, karena antara pendidikan dan kebudayaan terdapat hubungan integratif yang saling terkait. Pendidikan, baik secara teoritik maupun praksis tidak dapat terlepas dari kebudayaan. Pendidikan tidak terjadi di dalam suatu suasana yang vakum tetapi terkait.

Pendidikan, baik secara teoritik maupun praksis tidak dapat terlepas dari kebudayaan. Pendidikan tidak terjadi di dalam suatu suasana yang vakum tetapi terjadi karena interaksi antara manusia di dalam masyarakat yang berbudaya. Oleh sebab itu, pendidikan dan kebudayaan merupakan suatu kesatuan. Kebudayaan itu dinamis dan terus berkembang karena adanya proses pendidikan. Proses pendidikan bukan hanya proses transformasi nilai-nilai kebudayaan, tetapi juga merupakan pengembangan bahkan dapat mematikan kebudayaan. Sebagai proses transformasi, pendidikan mentransformasikan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi penerusnya. Pendidikan dapat membentuk pribadi-pribadi yang kreatif yang menjadi penggerak dan pengembang dari jaringan kebudayaan dimana ia hidup. Pribadi yang tidak kreatif dan tidak produktif bisa menjadi beban bagi masyarakatnya.

Selama Orde Baru, proses pendidikan mengalami distorsi yakni sebatas proses indoktrinasi dan telah membatasi kebudayaan hanya pada aspek intelektual semata-mata. Kebudayaan itu sendiri termasuk aspek-aspek seni, teknologi, ilmu pengetahuan, moral, dan agama; namun demikian selama ini pendidikan dalam arti schooling telah dibatasi hanya pada pengembangan intelektual dan mengarahkan sumber daya. Manusia kepada kebutuhan perkembangan industri. Nilai-nilai moral, nilai-nilai intelektual dan nilai-nilai kebudayaan telah diabaikan. Spektrum pengembangan inteligensi manusia hanya dibatasi pada inteligensi bagi pengembangan intelektual dan teknologi. Inteligensi emosional, inteligensi interperson, inteligensi spiritual telah diabaikan. Hasilnya adalah kepekaan manusiawi manusia menjadi

tumpul, yang tertinggal hanyalah manusia yang dikuasai oleh nafsu-nafsu dan nilai-nilai keserakahan, kekerasan, dan kekuasaan.

Upaya untuk mengaktualkan good governance melalui pendidikan kelihatannya masih harus menempuh jalan yang panjang. Pendidikan haruslah melakukan reorientasi dan berusaha menerapkan paradigma baru pendidikan nasional, yang tujuan akhirnya adalah pembentukan masyarakat Indonesia yang demokratis dan pada nilai-nilai berpegang civility (keadaban). Tujuan ini dapat tercapai apabila pendidikan mampu mengembangkan potensi manusia secara utuh. Yakni, manusia (anak didik dipandang sebagai kesatuan yang bulat-kesatuan jasmani-ruhani, kesatuan makhluk pribadi, makhluk social-makhluk Tuhan, kesatuan melangsungkan, mempertahankan dan mengembangkan hidupnya.

Melihat hakekat good governance sebagaimana diuraikan diatas, maka ada beberapa nilai-nilai yang perlu ditanamkan dalam masyarakat sejak dini melalui pendidikan, agar nilai-nilai menjadi integral dalam kepribadian dan menjadi budaya masyarakat itu sendiri. Sehingga hasil akhir dari pendidikan dapat menciptakan masyarakat yang siap dengan ide good governance disamping terciptanya generasi yang bisa menjadi pemimpin atau pelaku negara dengan tatanan yang baik.

Adapun nilai-nilai yang perlu dikembangkan oleh dunia pendidikan dalam rangka menciptakan good governance adalah: Pertama, demokrasi. Dalam pengembangan dan pengimplikasian ide good governance demokrasi merupakan salah satu nilai-nilai budaya yang sangat penting dan mendasar karena dengan kultur demokrasi, maka good governance dapat tumbuh, berkembang, dan hidup dengan subur. Pada Orde Reformasi sekarang ini, demokrasi mulai disadari oleh segenap lapisan masyarakat. Namun sayang sekali, nilai-nilai demokrasi masih dipahami sebagai tuntutan hak-hak semata dan mengesampingkan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap martabat. Dalam konteks ini, pendidikan dapat mengemban misi dan hendaknya demokrasi ditanamkan tidak hanya pada penguasaan kognitif saja, tetapi juga menjadi jiwa bagi pendidikan itu sendiri. Praktek-praktek pendidikan yang indoktrinasi akan mematikan potensi individu. Proses belajar mengajar yang mematikan daya inovatif dan berpikir kreatif sudah tidak pada tempatnya lagi.

Kedua, moral. Good governance tidak dapat dicapai bila sumber daya yang menjalankannya tidak memiliki imoral yang baik. Karena moral landasan yang penting bagi seseorang untuk bersikap, bertindak, dan berbuat sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, keberanian dan hidup sederhana merupakan nilai-nilai yang mutlak dimiliki oleh setiap pemimpin, nilai-nilai tersebut seorang pemimpin tidak bertindak hanya berdasarkan nafsu dan hasrat untuk menguasai tetapi menganggap bahwa

kekuasaan merupakan suatu amanah yang dipertanggung jawabkan di hadapan Allah. Pendidikan nasional yang bertujuan membentuk manusia seutuhnya sangat berperan penting dalam pengembangan nilai-nilai moral, dan seyogyanya pendidikan moral tidak hanya sekedar pengetahuan moral saja tetapi lebih jauh dari itu nilai-nilai moral dapat ditanamkan menjadi kepribadiansetiap anak didik.

Ketiga, berpikir kreatif-kritis. Kebudayaan di negara kita mengenal sistem feodalisme dan hierarki pada masyarakat, sehingga hal ini baik langsung maupun tidak membentuk masyarakat feodal. Masyarakat feodal kurang memperhatikan kepada kemampuan berfikir kreatif dan kritis.

Masyarakat feodal lebih percaya kepada tokoh-tokoh politik, tokoh agama (kyai), dan tokoh lainnya yang dipandang kharismatik, dari pada menggunakan nalar pikiran kritisnya sendiri dalam pengambilan keputusan. Masyarakat feodal tidak merasa kalau dirinya sering hanya dijadikan obyek dan komoditi yang laku dijual untuk bargaining yang bermotif politik maupun ekonomi yang menguntungkan secara sepihak pemimpinnya saja, sementara dirinya tidak memperoleh bagian apa-apa.

Keadaan seperti ini, tidak terlepas dari sejarah bangsa kita yang mempunyai pengalaman buruk pada masa penjajahan Belanda dan Jepang yang membunuh segala bentuk berpikir kreatif dan kritis. Warisan sejarah ini justru kemudian dilanggengkan dengan praktek politik dan pendidikan yang tidak mencerdaskan masyarakat. Tokoh politik dan tokoh agama sengaja mengambil keuntungan dari kondisi kepatuhan masyarakat tersebut, dan bagaimana kultur semacam itu terus dilestarikan. Idealnya pendidikan sebagai wadah pendewasaan manusia dapat mengembangkan kemampuan kreatif dan kritis. Dalam konteks pembentukan budaya masyarakat untuk implementasi good governance, maka diharapkan pendidikan dapat menumbuhkan sikap kritis masyarakat menumbuhkan sikap kritis terhadap pemerintahan sehingga ada kontrol yang baik, balance, dan proporsional. Sedangkan dalam kaitannya dalam pelaku good governance, pendidikan dapat mencetak pemimpin-pemimpin yang kreatif, kritis, dan produktif dalam menjalankan roda pemerintahan.

KESIMPULAN

Good governance sebagai sebuah ide dan wacana untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang baik sangat penting diperhatikan. Karena tanpa pemerintahan yang baik maka proses transformasi tidak dapat berjalan seperti yang diciptakan. Good governance dapat berkembang dan teraplikasi apabila didukung oleh masyarakat yang kondusif bagi ide ini. Masyarakat yang dapat mendukung ide ini tidak dapat terlepas dari budaya masyarakat yang

berkembang, sedangkan kebudayaan berkembang melalui pendidikan. Disinilah letak urgensi dan strategisnya pendidikan dalam menciptakan kultur good governance.

Demokrasi, moralitas, dan berpikir kreatif-kritis merupakan nilai-nilai yang perlu dikembangkan dan ditanamkan dalam menciptakan kultur good governance. Melalui pendidikan, nilai-nilai tersebut ditanamkan dan ditransformasikan ke dalam budaya masyarakat. Pendidikan nilai-nilai tersebut tidak sekedar pengetahuan kognitif saja, melainkan menjadi integral dalam pribadi generasi muda, calon pemimpin bangsa masa depan.

DAFTAR REFERENSI

- Hendato, Agung dan Nizar Subendar. 2002. Good Governance dan Penguatan Daerah (Jakarta: Masyarakat Transparasi Indonesia).
- MM. Billah. 2001. "Good Governance dan Kontrak Sosial" Jurnal Prisma, Jakarta. P3ES
- Mujani, Syaiful, et.al.2002 "Islam dan Kultur Good Governance Masyarakat Indonesia" TOR Seminar Nasional (Jakarta: PPIM UIN Syarif Hidayatullah)
- Muthohar, Ahmad.et.al.2000. Pendidikan Islam, Demokratisasi, dan Masyarakat Madani (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Santoso, Mas Ahmad.2001. Good Governance dan Hukum Lingkungan (Jakarta, ICEI).